Jurnal Perkembangan Kajian Sosial (PERKASA)
ISSN (online): 3047-6712
ISSN (print): 3047-6720
Vol. 3, No. 2, October 2026
DOI: 10.69616/perkasa.v3i2.635

Evaluation of PKH and Basic Food Assistance Distribution Quality for Extremely Poor Families in Tolitoli

Evaluasi Kualitas Penyaluran Bantuan PKH dan Sembako bagi Keluarga Miskin Ekstrem di Tolitoli

Nursifa[1*], **Muhammad Iqbal**[2], **Henra Rasa Putra**[3], **Sulpikar Sudirman**[4]
[*]nurashifatolis@gmail.com

[1,2,4] Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Madako Tolitoli, Jl. Kampus Madako, Tolitoli – Indonesia
[3] Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Madako Tolitoli, Jl. Kampus Madako, Tolitoli – Indonesia

Abstract

This study evaluates the quality of benefit delivery and access regarding the Family Hope Program (PKH) and the Sembako (Basic Food) Program for extremely poor families in Tolitoli Regency, focusing on delivery through an evidence-based policy approach. The researchers employed a descriptive-evaluative qualitative design and analyzed data from two districts: Baolan and North Tolitoli. The researchers purposively selected 66 informants, comprising government officials and program implementers, community members and actors, and academics. Data collection involved in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), observations, and secondary data sources (DTSEN, distribution reports, regulations, data from BPS/Dukcapil/Dapodik, and administrative records). Findings reveal a gap between administrative coverage and effective coverage; not all families registered in the system have actually received the assistance. Key obstacles include population data issues, problematic bank accounts, and data inconsistencies across DTSEN, Dukcapil, and Dapodik systems. Geographical barriers, a limited number of agents, and withdrawal service fees result in disparities in net benefits across groups and regions. The program implementers' limited capacity(average facilitator handling ≥ 300 beneficiary families) and weak cross-sectoral coordination exacerbate the situation. The study recommends developing a monitoring dashboard based on seven indicators, optimizing service points and alternative channels, ensuring fee transparency and strengthening complaint mechanisms, establishing regular coordination forums, and enhancing the capacity of facilitators and social welfare workers (TKSK).

Keywords: *evidence-based policy, extreme poverty, PKH, Basic Food Program, Tolitoli*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kualitas penyaluran dan akses manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako bagi keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Tolitoli dengan fokus pada dimensi *delivery* melalui pendekatan *evidence-based policy*. Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif-evaluatif dengan analisis data di dua kecamatan, yaitu Baolan dan Tolitoli Utara. Sebanyak 66 informan dipilih secara *purposive*, mencakup pemerintah/pelaksana program, masyarakat/aktor komunitas, dan akademisi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, FGD, observasi, dan data sekunder (DTSEN, laporan penyaluran, regulasi, data BPS/Dukcapil/Dapodik, dan bukti administratif). Temuan menunjukkan kesenjangan antara cakupan administratif dan cakupan efektif, yaitu keluarga yang tercatat dalam sistem belum semuanya menerima bantuan secara nyata. Hambatan utama meliputi masalah data kependudukan, rekening bermasalah, dan ketidaksinkronan

data antara DTSEN, Dukcapil, dan Dapodik. Hambatan geografis, keterbatasan agen, dan laporan biaya jasa penarikan menghasilkan ketimpangan manfaat bersih antarkelompok dan antarwilayah. Kapasitas pelaksana program terbatas (rata-rata pendamping menangani ≥ 300 KPM) dan koordinasi lintas sektor yang lemah memperburuk situasi. Penelitian merekomendasikan pengembangan dashboard pemantauan berbasis tujuh indikator, penataan titik layanan dan kanal alternatif, transparansi biaya dan penguatan pengaduan, forum koordinasi rutin, serta penguatan kapasitas pendamping dan TKSK.

Kata kunci: *evidence-based policy,* Miskin Ekstrem, PKH, Program Sembako, Tolitoli

Pendahuluan

Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang memerlukan keterpaduan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dengan strategi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan (Aulia, 2024). Dalam kerangka pengurangan beban pengeluaran, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako menjadi instrumen bantuan sosial untuk menopang pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin dan rentan. Kedua program ini dirancang sebagai bantuan sosial bersyarat dan bantuan pangan yang disalurkan secara tunai, dengan tujuan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin ekstrem melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan akumulasi modal manusia (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI, 2022; Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, 2024). Arah kebijakan tersebut diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menekankan sinergi program antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penentuan sasaran program (Presiden RI, 2025).

Pada tingkat nasional, komitmen tersebut diwujudkan melalui keberlanjutan penyediaan bantuan dalam skala besar. Pada tahun 2024-2025, pemerintah mengalokasikan anggaran PKH sekitar Rp28,71 triliun dengan sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sedangkan Program Sembako memperoleh alokasi sekitar Rp45,12 triliun dengan sasaran 18,8 juta KPM (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025; Kementrian Sosial RI, 2024). Besarnya alokasi dan sasaran program menunjukkan dukungan fiskal pemerintah terhadap perlindungan sosial, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan ketepatan sasaran maupun manfaat yang diterima keluarga. Analisis terhadap data Susenas 2021–2023 menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial, termasuk PKH dan Program Sembako, masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran dan fragmentasi basis data (Aulia, 2024). Dengan demikian, realisasi komitmen nasional perlu dilihat bukan hanya melalui penyediaan anggaran dan penetapan penerima, melainkan juga melalui kemampuan program menjangkau keluarga yang membutuhkan. Dengan demikian, realisasi komitmen nasional perlu dilihat juga melalui kemampuan program menjangkau keluarga yang membutuhkan.

Urgensi penguatan pelaksanaan kedua program tersebut terlihat dari masih adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar meskipun indikator kemiskinan nasional menunjukkan perbaikan. BPS mencatat bahwa pada Maret 2025 persentase penduduk miskin mencapai 8,47 persen atau 23,85 juta orang, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 9,03 persen atau 25,22 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2025). Secara terpisah, kemiskinan ekstrem juga menurun dari 1,26 persen atau sekitar 3,56 juta orang pada Maret 2024 menjadi 0,85 persen atau 2,38 juta orang pada Maret 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem masih menjadi persoalan nasional yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Namun, penurunan indikator agregat tersebut tidak dapat langsung diatribusikan sebagai dampak PKH dan Program Sembako karena data deskriptif tidak memisahkan pengaruh kedua program dari faktor-faktor lainnya.

Bukti penelitian memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai kontribusi dan keterbatasan bantuan sosial. Evaluasi eksperimental Cahyadi et al. (2020) menunjukkan bahwa PKH meningkatkan capaian pendidikan dan kesehatan setelah enam tahun pelaksanaan, tetapi belum menghasilkan perubahan ekonomi rumah tangga yang bersifat transformative (Cahyadi et al., 2020). Sementara itu, Banerjee et al. (2023) menemukan bahwa peralihan bantuan pangan dalam bentuk

barang menjadi voucher elektronik meningkatkan nilai bantuan yang diterima rumah tangga sasaran sebesar 46 persen serta menurunkan kemiskinan sekitar 20 persen secara relatif pada kelompok 15 persen rumah tangga terbawah pada kondisi awal (Banerjee et al., 2023). Kedua penelitian tersebut tidak secara langsung mengukur dampak gabungan PKH dan Program Sembako terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem, tetapi memperlihatkan bahwa manfaat program perlu ditelaah menurut jenis intervensi, luaran yang diukur, dan mekanisme penyalurannya. Temuan ini menjadi dasar penting untuk menelaah bagaimana komitmen perlindungan sosial diterjemahkan menjadi penerimaan manfaat di tingkat daerah.

Di tingkat daerah, komitmen nasional tersebut menghadapi realitas yang kompleks. Kabupaten Tolitoli masih menghadapi persoalan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang memerlukan penanganan lintas sektor. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 29.980 jiwa atau 12,2 persen, dengan garis kemiskinan sebesar Rp461.199 per kapita per bulan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli, 2026). DTSEN November 2025 mencatat bahwa kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tolitoli terkonsentrasi pada 10.156 keluarga atau 35.971 jiwa pada desil 1 dari total 83.058 keluarga dalam DTSEN dan mencakup 37.672 keluarga desil 1–5 sebagai sasaran potensial penerima bantuan sosial pada tahun 2025 (Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli, 2025), pada akhirnya dibatasi Kembali hingga desil 4 pada tahun 2026. Konsentrasi kemiskinan ekstrem ini tidak merata antarkecamatan; Kecamatan Baolan memiliki jumlah keluarga desil 1 terbesar secara absolut, sementara Ogodeide (24,3 persen), Dampal Utara (20,4 persen), dan Tolitoli Utara (15,5 persen) menunjukkan proporsi kemiskinan ekstrem yang lebih tinggi, sehingga memerlukan prioritas penanganan yang berbeda berdasarkan beban pelayanan dan intensitas kemiskinan (Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli, 2025).

Tabel 1. Distribusi Keluarga Desil 1 per Kecamatan di Kabupaten Tolitoli Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu	Keluarga Desil 1	Individu Desil 1
Dampal Selatan	8.183	24.420	919	3.326
Dampal Utara	5.540	16.232	1.131	3.500
Dondo	8.328	25.690	1.173	4.391
Basidondo	3.896	11.784	659	2.436
Ogodeide	4.600	14.247	1.116	4.299
Lampasio	4.708	13.951	759	2.722
Baolan	24.069	70.864	1.566	5.084
Galang	13.214	39.233	1.192	4.188
Tolitoli Utara	6.904	20.896	1.072	3.893
Dakopamean	3.616	10.961	569	2.132
Total	83.058	248.278	10.156	35.971

Sumber data: DTSEN November 2025, Dinas Sosial Kabupaten Tolitol

Pelaksanaan PKH dan Program Sembako di Kabupaten Tolitoli merupakan bagian dari penerapan kebijakan nasional percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat daerah. Untuk menggambarkan pelaksanaan kedua program secara berkesinambungan, penelitian ini berupaya menelusuri data realisasi penyaluran pada periode 2023–2025. Namun, data realisasi penyaluran tahun 2023–2024 tidak berhasil diperoleh melalui akses DTSEN. Pada penyaluran tahun 2025, cakupan administratif PKH dan Program Sembako di Kabupaten Tolitoli tergolong besar dengan 11.861 KPM PKH dan 18.043 KPM Program Sembako, realitas implementasi di lapangan menunjukkan bahwa jumlah penerima terdaftar tidak otomatis menjamin penerimaan manfaat yang efektif (Bank Mandiri Cabang Tolitoli, 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya memperhatikan tata kelola data dan akses layanan dalam pelaksanaan perlindungan sosial. Widyaningsih et al. (2023), melalui studi kasus di enam daerah di Indonesia, menekankan bahwa pemutakhiran data kemiskinan secara berkelanjutan dan berkualitas diperlukan untuk mendukung ketepatan sasaran program (Widyaningsih et al., 2023). Sementara itu, Wahyudi et al. (2024) mengidentifikasi hambatan perlindungan sosial di wilayah terpencil Indonesia, termasuk kendala geografis, biaya akses, dan keterbatasan layanan (Wahyudi et al., 2024). Kedua kajian tersebut memberikan dasar untuk menelaah hubungan antara pencatatan penerima dan akses terhadap manfaat bantuan.

Kerentanan ini diperparah oleh kondisi ekonomi lokal yang menantang. Kabupaten Tolitoli mencatat inflasi tertinggi di Sulawesi Tengah sebesar 6,13 persen pada Desember 2025 dengan IHK 117,02, serta garis kemiskinan Rp461.199 per kapita per bulan pada 2025 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli, 2025). Tekanan inflasi daerah ini turut memperberat kondisi rumah tangga miskin karena kenaikan harga pangan dan kebutuhan dasar, sehingga keterlambatan atau kesulitan dalam penyaluran bantuan dapat berdampak langsung pada kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini juga diperburuk oleh keterbatasan infrastruktur pasar, transportasi, dan akses pendidikan menengah di sejumlah kecamatan, yang membuat kualitas penyaluran bantuan menjadi sangat krusial bagi efektivitas perlindungan sosial. Studi tentang perlindungan sosial di wilayah terpencil Indonesia menunjukkan bahwa hambatan geografis, biaya transportasi, dan keterbatasan fasilitas perbankan dapat secara signifikan mengurangi manfaat bersih yang diterima rumah tangga miskin (Wahyudi et al., 2024).

Berdasarkan uraian di atas, menjadi jelas bahwa efektivitas PKH dan Program Sembako tidak dapat diukur hanya dari besarnya dana yang dialokasikan atau jumlah KPM yang terdaftar dalam sistem. Bantuan sosial hanya efektif apabila tidak hanya tersalurkan secara administratif, tetapi benar-benar diterima oleh keluarga yang berhak, dapat dicairkan dengan biaya akses yang wajar, dan memberikan manfaat bersih yang memadai bagi keluarga miskin ekstrem. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan evaluasi pada dimensi *delivery* menyangkut kualitas penyaluran dan akses manfaat sebagai kunci untuk memahami mengapa sebagian keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Tolitoli belum sepenuhnya memperoleh perlindungan yang dijanjikan oleh kebijakan nasional.

Implementasi PKH dan Program Sembako di Kabupaten Tolitoli masih dihadapkan pada persoalan kualitas penyaluran, terutama dalam memastikan keluarga miskin ekstrem dapat menerima bantuan secara utuh, tepat waktu, aman, dan terjangkau. Informasi awal menunjukkan adanya keluarga desil 1 yang belum tercatat sebagai penerima, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum tersalurkan, rekening bermasalah, serta ketidaksesuaian data kependudukan. Data DTSEN November 2025 mencatat 10.156 keluarga desil 1, sedangkan rekapitulasi penyaluran hingga November 2025 menunjukkan 297 KKS belum tersalurkan, terdiri atas 127 KKS PKH dan 170 KKS Program Sembako. Kedua data tersebut menggambarkan konteks kepesertaan dan persoalan penyaluran yang perlu ditelusuri lebih lanjut, tetapi belum dapat langsung digunakan untuk menentukan proporsi keluarga desil 1 yang tidak menerima bantuan tanpa pencocokan data penerima. Persoalan NIK tidak valid atau ganda, pembaruan Kartu Keluarga, dan kesesuaian data antarinstansi juga menjadi perhatian dalam menelaah kelancaran akses bantuan. Literatur mengenai fragmentasi dan pemutakhiran data memberikan konteks bagi pentingnya menelusuri persoalan administrasi tersebut, tanpa menggantikan kebutuhan pembuktian pada tingkat lokal (Hadiwidjaja et al., 2022). Dengan demikian, fenomena yang perlu dikaji bukan hanya keterdaftaran keluarga dalam sistem, melainkan juga keberlanjutan proses layanan hingga bantuan dapat diterima.

Selain persoalan administrasi, kondisi geografis dan ketersediaan dukungan layanan menjadi konteks penting penyaluran bantuan di Kabupaten Tolitoli. Informasi awal di Pulau Lutungan, Kecamatan Baolan, mencatat kebutuhan biaya perahu pulang-pergi sekitar Rp30.000 untuk mengakses lokasi penarikan, sedangkan sebagian KPM di Dusun Salu, Kelurahan Nalu, perlu menempuh perjalanan sekitar dua kilometer menuju jalan raya dan titik layanan. Terdapat pula laporan biaya penarikan melalui agen sebesar Rp5.000–Rp10.000, bahkan mencapai Rp20.000 pada kasus tertentu. Rincian lokal tersebut perlu ditelusuri sumber dan variasinya; sementara itu, konsep akses keuangan yang bermakna memberikan dasar untuk memperhatikan biaya transaksi dan hambatan geografis dalam penggunaan layanan (Ojah & Kodongo, 2024). Dari sisi pendampingan, tercatat 35 pendamping PKH melayani 11.314 KPM pada tahap II tahun 2026 (Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli, 2026), disertai informasi awal mengenai keterbatasan pendampingan penerima Program Sembako non-PKH dan belum tersedianya TKSK di Kecamatan Tolitoli Utara. Kondisi tersebut menjadi alasan untuk menelaah keterjangkauan layanan, dukungan pendampingan, dan penanganan keluhan, bukan langsung menyimpulkan ketidakefektifan program. Berangkat dari perhatian terhadap manfaat yang diterima rumah tangga, evaluasi penelitian ini diarahkan pada pengalaman penerima dan hambatan akses, melampaui pencatatan kepesertaan serta realisasi penyaluran semata (Timire et al., 2022).

Permasalahan kualitas penyaluran dan akses manfaat PKH dan Program Sembako di Kabupaten Tolitoli mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dimensi *delivery* secara

sistematis, karena tanpa pemahaman komprehensif tentang hambatan penyaluran, biaya akses, dan pengalaman penerima di lapangan, kebijakan perlindungan sosial berisiko hanya mencapai capaian administratif tanpa memberikan manfaat nyata bagi keluarga miskin ekstrem. Meskipun literatur evaluasi bantuan sosial di Indonesia telah berkembang, terdapat lima celah analitis penting: (1) mayoritas studi masih berfokus pada dampak makroekonomi dan ketepatan sasaran, bukan pada rantai penyaluran dan pengalaman penerima; (2) keterbatasan literatur tentang *delivery* di wilayah kepulauan dan terpencil, dengan studi yang ada cenderung berfokus pada konteks perkotaan; (3) minimnya penelitian yang menyoroti kabupaten menengah dengan karakteristik geografis kompleks seperti Tolitoli; (4) konsep *net benefit* masih jarang diterapkan dalam evaluasi PKH dan Program Sembako; dan (5) kurangnya integrasi antara data administratif dan temuan kualitatif. Penelitian ini berupaya mengisi celah-celah tersebut dengan mengembangkan kerangka indikator yang membedakan *administrative coverage* dan *effective coverage*, memperhitungkan *net benefit*, dan mengintegrasikan data administratif (DTSEN, laporan bank/PT Pos) dengan temuan kualitatif untuk menghasilkan diagnosis yang kontekstual dan rekomendasi yang operasional bagi kabupaten menengah berkarakteristik kepulauan di Indonesia Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas penyaluran dan akses manfaat bantuan PKH dan Program Sembako bagi keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Tolitoli dengan fokus pada dimensi *delivery* melalui pendekatan *evidence-based policy* (Banerjee et al., 2023; Cairney & Oliver, 2017). Evaluasi ini dirancang untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan operasional dalam rantai penyaluran bantuan sosial, mulai dari mekanisme distribusi hingga penerimaan manfaat aktual oleh rumah tangga, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti empiris.

Penelitian ini penting untuk memahami kendala yang dihadapi keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Tolitoli dalam menerima bantuan PKH dan Program Sembako. Jumlah penerima yang tercatat dan laporan realisasi penyaluran belum cukup untuk menjelaskan apakah bantuan diterima tepat waktu, mudah dicairkan, dan dapat diakses dengan biaya yang terjangkau. Dengan menelaah proses penyaluran dan pengalaman penerima, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli, pelaksana program, Bank Mandiri, PT Pos Indonesia, agen e-warong, dan pemerintah daerah dalam memperbaiki layanan. Perbaikan tersebut mencakup penentuan lokasi layanan yang lebih mudah dijangkau, kejelasan informasi biaya, serta koordinasi pembaruan data dan penyelesaian kendala pencairan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif (Doyle et al., 2020; Villamin et al., 2025) yang diperkaya analisis data administrative. Desain tersebut dikembangkan dengan orientasi evaluatif untuk menilai pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako pada dimensi *delivery* di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah. Fokus komparatif ditetapkan pada dua kecamatan, yaitu Baolan dan Tolitoli Utara yang dipilih berdasarkan kontras karakteristik jumlah absolut, proporsi kemiskinan ekstrem serta variasi cakupan program. Sebanyak 66 informan dipilih secara purposive dengan pendekatan maximum variation (Moser & Korstjens, 2018).

Tabel 2. Komposisi Informan Penelitian

Kelompok Informan	Jumlah	Fungsi data
Pemerintah dan pelaksana program	13	Menjelaskan kebijakan, penetapan sasaran, penyaluran, dan kendala implementasi program
Anggota DPRD Komisi A	1	Menjelaskan pengawasan kebijakan, anggaran, dan aspirasi masyarakat
Masyarakat dan aktor komunitas, meliputi KPM aktif, KPM graduasi, keluarga *eligible* non-penerima, ketua RT/RW, dan LSM	51	Menjelaskan pengalaman penerimaan bantuan, akses penyaluran, pemanfaatan, dan kondisi sosial ekonomi
Akademisi	1	Memberikan perspektif kebijakan dan evaluasi program

Total	**66**	**Mendukung triangulasi sumber, metode, dan temuan**

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, FGD (dua sesi), observasi rumah tangga KPM, fasilitas layanan, dan titik penyaluran, serta data sekunder (DTSEN 2025–2026, laporan penyaluran, regulasi, data BPS/Dukcapil/Dapodik, dan bukti verifikasi temuan kasus). Instrumen penelitian meliputi peneliti sebagai instrumen utama, panduan wawancara/FGD semi-terstruktur, lembar observasi, alat dokumentasi, dan lembar kerja verifikasi kasus prioritas. Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui reduksi data (*coding* tematik berdasarkan kerangka *delivery*, *coverage*, *net benefit*), penyajian data (*display matrices*, ringkasan kasus, peta aktor), dan penarikan kesimp ulan/verifikasi via triangulasi sumber, *member check*, dan pemeriksaan konsistensi *coding*. Data statistik/administratif digunakan sebagai konteks, bukan basis inferensi utama, sesuai pendekatan *evidence-based policy* untuk menghasilkan rekomendasi yang berbasis bukti dan operasional. Kredibilitas temuan dipastikan melalui triangulasi, *audit trail*, *member check*, *research diary*, dan pemeriksaan konsistensi *coding* (J. W. Creswell and C. N. Poth, 2018; Nowell et al., 2017; O'Connor & Joffe, 2020).

Hasil

Pada tingkat kabupaten, jumlah penerima PKH tercatat sebanyak 11.861 KPM pada November 2025 dan 11.314 KPM pada Mei 2026. Pada periode yang sama, penerima Program Sembako berjumlah 18.043 KPM dan kemudian menjadi 15.940 KPM (Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli, 2026). Perubahan jumlah penerima tersebut berkaitan dengan pemutakhiran data, graduasi, dan perubahan kebijakan penetapan desil sasaran. Di tingkat lokasi penelitian, cakupan bantuan pada keluarga desil 1 di Kecamatan Baolan lebih rendah daripada Kecamatan Tolitoli Utara.

Tabel 3. Cakupan PKH dan Program Sembako pada Keluarga Desil 1 di Lokasi Penelitian, Mei 2026

Kecamatan	Keluarga desil 1	KPM PKH desil 1	Cakupan PKH (%)	KPM Sembako desil 1	Cakupan Sembako (%)
Baolan	1.925	705	36,6	807	41,9
Tolitoli Utara	1.067	601	56,3	677	63,4

Sumber: Olah data DTSEN Mei 2026, Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli

Tabel 4. Kanal Penyaluran dan Hambatan Akses bagi KPM

Kanal Penyaluran	Keunggulan utama	Hambatan utama
ATM Bank Mandiri	Pencairan mandiri dan tanpa biaya jasa penarikan	Tidak tersedia dekat seluruh wilayah; membutuhkan mobilitas KPM; himbauan pihak bank menarik di agen e-waroeng
Agen e-warong	Relatif lebih dekat dengan permukiman KPM	Jumlah agen terbatas, gangguan jaringan, dan laporan biaya jasa penarikan
PT Pos Indonesia	Alternatif bagi KPM tanpa KKS atau KKS bermasalah	Layanan terpusat, antrean, dan ketergantungan pada ketepatan undangan
Titik penyaluran komunitas	Mendekatkan layanan ke desa atau kecamatan	Memerlukan jadwal jelas, kapasitas pelayanan, dan distribusi informasi yang baik

Sumber: Olahan data penelitian, 2026

Tabel 1 memperlihatkan bahwa Baolan memiliki jumlah keluarga desil 1 dan jumlah KPM lebih besar secara absolut, tetapi proporsi cakupan PKH dan Program Sembako lebih rendah dibandingkan Tolitoli Utara. Selisih antara jumlah keluarga desil 1 dan penerima bantuan menunjukkan adanya indikasi ketidaktercakupan (*uncovered*) yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Namun, selisih tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai *exclusion error*, karena kepesertaan PKH ditentukan pula oleh keberadaan komponen keluarga, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas berat, serta dipengaruhi status data dan mekanisme kepesertaan program.

Penyaluran PKH dan Program Sembako di Kabupaten Tolitoli menggunakan beberapa kanal, yaitu KKS melalui ATM Bank Mandiri, agen e-warong, PT Pos Indonesia, dan titik penyaluran komunitas pada tingkat desa atau kecamatan. KPM dengan KKS aktif umumnya mencairkan bantuan melalui ATM atau agen, sedangkan KPM yang belum memiliki KKS atau mengalami kendala rekening dapat menerima bantuan melalui PT Pos atau titik penyaluran komunitas. Keragaman kanal tersebut dimaksudkan untuk memperluas jangkauan layanan, tetapi temuan menunjukkan bahwa tersedianya beberapa kanal belum sepenuhnya menjamin akses yang setara bagi seluruh KPM.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kendala penyaluran bantuan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan kanal, tetapi juga dengan pemutakhiran dan kesesuaian data KPM. Kendala yang ditemukan meliputi pembaruan data keluarga yang belum terekam dalam sistem, ketidaksesuaian data identitas, NIK ganda, perubahan domisili, serta keterlambatan pembaruan rekening atau KKS. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses validasi identitas, pengaktifan rekening, penerbitan KKS, dan pencairan bantuan.

Sebagian KPM menyampaikan keluhan melalui pendamping PKH, TKSK, kantor desa, atau petugas di titik penyaluran. Namun, penanganan keluhan masih bergantung pada koordinasi antarpihak, terutama antara Dinas Sosial, bank penyalur, PT Pos, dan pemerintah desa. Dengan demikian, mekanisme pengaduan KPM terhadap kendala penyaluran bantuan belum sepenuhnya berjalan secara terpadu.

Diskusi/Pembahasan

Penyaluran Administratif dan Akses Efektif

Penyaluran bantuan sosial (*social assistance delivery*) tidak hanya berupa transfer dana, tetapi merupakan sistem layanan yang menghubungkan hak administratif penerima dengan manfaat nyata di tingkat rumah tangga; karena itu, hambatan pada proses registrasi, pembayaran, pemutakhiran data, maupun penanganan keluhan dapat mengurangi efektivitas program (Lindert et al., 2020). Efektivitas bantuan tidak hanya ditentukan oleh anggaran dan ketepatan sasaran, tetapi juga oleh aksesibilitas layanan, ketepatan waktu, keamanan transaksi, biaya akses, informasi, serta kemampuan KPM menggunakan kanal penyaluran. Digitalisasi melalui rekening, KKS, ATM, dan agen e-warong dapat memperluas inklusi keuangan, tetapi manfaatnya tetap bergantung pada ketersediaan infrastruktur, kualitas jaringan, biaya perjalanan, literasi, dan pendampingan penerima (Djamaluddin, 2016; Julaihah et al., 2026).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako tidak cukup diukur melalui jumlah KPM terdaftar, KKS yang telah diterbitkan, atau dana yang telah dialokasikan kepada lembaga penyalur. Status administratif tersebut belum selalu berujung pada penerimaan manfaat secara efektif. Di Kabupaten Tolitoli, masih ditemukan KKS yang belum tersalur, rekening atau kartu yang belum dapat digunakan, serta kendala identitas dan data kependudukan yang menghambat pencairan bantuan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara *administrative coverage*, yaitu keluarga yang telah tercatat dalam sistem, dan *effective coverage*, yaitu keluarga yang benar-benar menerima bantuan secara utuh, tepat waktu, aman, dan terjangkau (Devany & Imanuari Pertiwi, 2025; World Bank Group, 2020). Oleh karena itu, indikator *delivery* di Kabupaten Tolitoli perlu bergeser dari ukuran “bantuan telah disalurkan” menjadi “bantuan telah diterima dan dapat digunakan oleh KPM”. Pergeseran ini penting karena keterlambatan, ketidakpastian, dan hambatan dalam proses pencairan dapat membatasi manfaat yang diterima kelompok sasaran (Firmansyah & Darmastuti, 2026; Timire et al., 2022).

Temuan ini sejalan dengan Lindert et al. (2020), yang menegaskan bahwa efektivitas bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh ketepatan sasaran dan alokasi anggaran, tetapi juga oleh aksesibilitas layanan, ketepatan waktu, keamanan transaksi, ketersediaan informasi, serta kemampuan penerima menggunakan kanal penyaluran (Lindert et al., 2020). Dengan demikian, capaian administratif perlu dilengkapi dengan indikator penerimaan aktual, keberhasilan transaksi, dan penyelesaian keluhan. Hal ini juga sejalan dengan Jhon Kamaru et al. (2026), yang menekankan bahwa efektivitas bantuan sosial ditentukan oleh interaksi proses administratif dengan hasil yang diterima penerima, termasuk akurasi penargetan, komunikasi program, pencapaian tujuan, serta pemantauan dan pengawasan (Jhon Kamaru et al., 2026).

Berdasarkan temuan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli perlu menerjemahkan kerangka

evaluasi *delivery* ke dalam sistem pemantauan operasional yang mampu menelusuri posisi dan hambatan setiap KPM dalam rantai penyaluran bantuan. Sistem ini perlu menyajikan data secara terpilah menurut kecamatan, desa/kelurahan, kanal penyaluran, kelompok rentan, serta status KKS, sehingga masalah seperti kartu belum tersalur, rekening tidak aktif, transaksi gagal, biaya akses tinggi, atau keluhan yang belum ditindaklanjuti dapat segera diidentifikasi. Pengembangan dashboard atau matriks pemantauan tersebut perlu dilakukan secara kolaboratif oleh Dinas Sosial, bank penyalur, dan PT Pos melalui pembaruan data berkala, misalnya setiap bulan atau triwulan, disertai mekanisme penugasan dan batas waktu penyelesaian kasus. Dengan demikian, pemantauan tidak berhenti pada pelaporan capaian program, tetapi menjadi instrumen pengambilan keputusan untuk mempercepat penyelesaian hambatan dan memastikan KPM memperoleh manfaat bantuan secara nyata.

Hambatan Akses dan Ketimpangan Manfaat Bersih

Temuan penelitian diwilayah sulit akses seperti di Pulau Lutungan dan Dusun Salu, Kelurahan Nalu Kabupaten Tolitoli menghadapi hambatan geografis, biaya transportasi, keterbatasan kanal layanan, dan ketimpangan manfaat bersih menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan studi Wahyudi et al. (2024) tentang inklusi perlindungan sosial di wilayah terpencil Indonesia. Temuam tersebut menunjukkan rumah tangga miskin di wilayah *remote* menghadapi hambatan geografis, finansial, dan keterbatasan fasilitas perbankan yang secara signifikan membatasi efektivitas penyaluran bantuan sosial (Wahyudi et al., 2024). Temuan ini juga konsisten dengan literatur yang menyatakan bahwa tersedianya layanan keuangan formal belum otomatis menjamin akses efektif bagi rumah tangga miskin di wilayah terpencil, karena hambatan jarak, biaya transaksi, keterbatasan agen, dan kapasitas pengguna dapat membatasi manfaat layanan tersebut (Djamaluddin, 2016; Wahyudi et al., 2024). Studi lain juga melaporkan bahwa biaya transportasi untuk mengambil bantuan tunai di Indonesia umumnya berkisar antara Rp5.000–Rp25.000 untuk perjalanan pulang-pergi, dan dapat mencapai Rp40.000 bagi lansia yang harus membayar pendamping (Rosfadhila et al., 2013).

Temuan mengenai wilayah sulit akses, keterbatasan agen, gangguan jaringan, antrean, serta laporan biaya penarikan di agen e-warong menunjukkan bahwa akses terhadap bantuan belum sepenuhnya setara. Bantuan dengan nominal yang sama dapat menghasilkan manfaat bersih yang berbeda karena KPM menanggung biaya akses yang tidak seragam. KPM yang tinggal dekat ATM atau agen aktif, memiliki kendaraan, dan mampu melakukan transaksi secara mandiri cenderung memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan KPM di wilayah terpencil, kepulauan, lansia, penyandang disabilitas, atau keluarga dengan mobilitas terbatas. Interpretasi ini sejalan dengan konsep inklusi keuangan efektif yang menekankan bahwa keberadaan layanan keuangan formal belum tentu menghasilkan akses yang bermakna apabila masyarakat masih menghadapi biaya transaksi, hambatan geografis, dan keterbatasan kapasitas dalam menggunakan layanan tersebut (Ojah & Kodongo, 2024).

Konsep manfaat bersih (*net benefit*) melengkapi kerangka evaluasi dengan memperhitungkan nilai bantuan setelah dikurangi berbagai biaya akses yang ditanggung penerima, seperti biaya transportasi, bahan bakar, biaya jasa penarikan, waktu, dan risiko transaksi. Bagi rumah tangga dengan pendapatan tidak tetap, seperti nelayan, buruh harian, atau pekerja informal, pengurangan beberapa puluh ribu rupiah dari bantuan PKH (Rp225.000–Rp600.000 per triwulan) atau Program Sembako (Rp200.000 per bulan) dapat berdampak besar pada kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar, terutama di tengah tekanan inflasi daerah yang tinggi. Literatur tentang inklusi keuangan efektif menekankan bahwa akses terhadap layanan keuangan formal tidak otomatis berarti akses yang bermakna apabila terdapat biaya transaksi, hambatan geografis, atau keterbatasan kapasitas pengguna (Ojah & Kodongo, 2024). Secara keseluruhan, kerangka konseptual ini ditempatkan dalam pendekatan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang mengacu pada model Head, Nutley, dan Cairney, mencakup lima tahap: diagnosis masalah, pengumpulan bukti empiris, perancangan rekomendasi berbasis bukti, analisis implementasi, serta pemantauan dan evaluasi capaian kebijakan (Cairney & Oliver, 2017). Studi tentang *evidence-based policy* dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan bukti empiris yang kuat—baik data administratif maupun temuan kualitatif—dapat meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan dan memfasilitasi pembelajaran institusional antar-pelaku, meskipun fragmentasi data dan keterbatasan kapasitas daerah masih menjadi hambatan (Hasnita & Salomo, 2025; Lentari, 2024; Widyaningsih et al., 2023). Dengan mengintegrasikan konsep *delivery*, *administrative vs effective coverage*, *net benefit*, dan *evidence-based policy*, penelitian ini berupaya memberikan evaluasi yang

lebih holistik dan berorientasi pada pengalaman penerima, bukan hanya capaian administratif program.

Dalam konteks Tolitoli, keberadaan ATM, agen e-warong, PT Pos, dan titik penyaluran komunitas memang memperluas pilihan kanal, tetapi diversifikasi kanal belum otomatis menjamin akses efektif apabila layanan tidak tersedia secara stabil, sulit dijangkau, atau menimbulkan biaya yang mengurangi nilai bantuan. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa waktu perjalanan, waktu antre, dan biaya transportasi memengaruhi persepsi penerima terhadap kemudahan sistem bantuan nontunai (Djamaluddin, 2016). Selain itu, penelitian di Indonesia Timur menunjukkan bahwa inklusi keuangan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, terutama ketika rumah tangga memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan, khususnya kredit, dalam konteks wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses layanan formal (Kadir et al., 2025). Dengan demikian, kualitas penyaluran bantuan perlu dinilai tidak hanya dari tersedianya kanal pembayaran, tetapi juga dari kemampuan KPM untuk mengakses, menggunakan, dan memperoleh manfaat bersih dari bantuan secara aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penataan titik layanan dan jadwal penyaluran komunitas bagi wilayah sulit jangkau, kepulauan, lansia, dan penyandang disabilitas, serta penyediaan kanal alternatif bagi KPM dengan KKS bermasalah atau mobilitas rendah, seperti penyaluran tunai melalui PT Pos atau titik penyaluran komunitas yang terjadwal. Informasi jadwal, prosedur, hak KPM, dan mekanisme pengaduan harus dapat diakses secara jelas oleh keluarga penerima, misalnya melalui papan informasi di kantor desa, penyampaian informasi oleh pendamping PKH dan TKSK, atau media komunikasi yang sesuai dengan konteks lokal. Perlu juga verifikasi biaya penarikan berdasarkan ketentuan bank, SOP agen, struk transaksi, dan aduan KPM, serta penegasan larangan pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Kanal pengaduan yang mudah dijangkau dan memiliki mekanisme tindak lanjut yang terdokumentasi perlu dibuka, misalnya melalui nomor telepon khusus, aplikasi pengaduan, atau kotak saran di kantor desa dan titik penyaluran. Rekomendasi ini sejalan dengan temuan bahwa peningkatan anggaran program dan eksplorasi model pembiayaan berkelanjutan untuk penyaluran bantuan sosial di wilayah terpencil merupakan langkah operasional penting untuk mengurangi hambatan akses (Wahyudi et al., 2024). Studi lain juga merekomendasikan penguatan layanan keuangan digital, ekspansi cakupan program perlindungan sosial, dan integrasi dengan mekanisme lokal sebagai strategi berkelanjutan untuk memperkuat dampak pengurangan kemiskinan (Djamaluddin, 2016; Kadir et al., 2025).

Tata Kelola Data dan Koordinasi sebagai Penentu *Delivery*

Persoalan pembaruan data, ketidakakuratan NIK, dan ketidaksesuaian data kependudukan di Tolitoli sejalan dengan temuan Hadiwidjaja, Williams, dan Giannozzi (2022) tentang registri sosial di Indonesia, yang menunjukkan bahwa fragmentasi data dan pemutakhiran yang tidak berkelanjutan merupakan hambatan struktural bagi efektivitas bantuan sosial (Hadiwidjaja et al., 2022). Di Tolitoli, ditemukan NIK tidak valid atau ganda, KK belum diperbarui setelah perkawinan atau perpindahan, ketidaksesuaian ejaan nama, perbedaan tanggal lahir atau nama ibu kandung, serta sebagian lansia belum memperbarui e-KTP. Ketidaksesuaian ini menghambat pencocokan identitas, validasi *by name by address* (BNBA), pengaktifan rekening, penerbitan KKS, maupun munculnya komponen bantuan dalam sistem. Hadiwidjaja et al. (2022) menekankan bahwa kualitas data registri sosial menentukan ketepatan sasaran, efisiensi penyaluran, dan akuntabilitas program, sehingga pemutakhiran berkelanjutan dan sinkronisasi lintas sektor merupakan prasyarat bagi efektivitas bantuan sosial. Temuan Tolitoli memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa ketidaksinkronan data DTSEN, Dukcapil, Dapodik, dan data penyaluran menyebabkan keterlambatan koreksi data dan memperpanjang risiko keluarga tidak menerima manfaat. Studi lain juga melaporkan bahwa tantangan seperti fragmentasi data, kurangnya standarisasi, infrastruktur teknologi yang tidak memadai, dan koordinasi antarlembaga yang lemah menghambat upaya pengurangan kemiskinan yang efisien (Ramayanti & Holijah, 2026).

Temuan tentang NIK tidak valid atau ganda, KK yang belum diperbarui, perubahan domisili, kematian KPM, ketidaksesuaian data keluarga, serta keterlambatan pembaruan rekening dan KKS menunjukkan bahwa persoalan penyaluran bantuan bukan semata-mata masalah teknis perbankan atau distribusi kartu. Persoalan tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola data dan koordinasi antarlembaga. Ketika perubahan kondisi keluarga tidak segera diterjemahkan ke dalam pembaruan DTSEN, data Dukcapil, data pendidikan, rekening bantuan, dan status kepesertaan, maka keluarga

yang seharusnya menerima bantuan berisiko tertunda atau tidak memperoleh manfaat secara efektif. Temuan ini sejalan dengan Widyaningsih, Ruhmaniyati, dan Toyamah (2023), yang menekankan bahwa pemutakhiran data kemiskinan secara berkelanjutan dan berkualitas merupakan prasyarat penting bagi ketepatan sasaran program perlindungan sosial (Widyaningsih et al., 2023). Penelitian Hasnita dan Salomo (2025) juga menggarisbawahi arti pembelajaran kebijakan dan integrasi data untuk mendukung kebijakan yang berbasis bukti (Hasnita & Salomo, 2025). Kedua perspektif tersebut memperlihatkan bahwa kualitas data tidak hanya menentukan siapa yang tercatat sebagai penerima, tetapi juga menentukan kesinambungan layanan setelah keluarga mengalami perubahan kondisi sosial, ekonomi, maupun kependudukan. Studi lain juga menegaskan bahwa meskipun sistem SIKS-NG telah meningkatkan sentralisasi dan transparansi data, tantangan seperti kapasitas administrator yang terbatas, ketidaksesuaian data NIK dengan Dukcapil, kurangnya sosialisasi, dan koordinasi antarlembaga yang lemah masih persisten (Harthamia et al., 2025; Sarjito, 2025).

Tindak lanjut dari temuan di atas diperlukan pengembangan mekanisme verifikasi BNBA dan pemutakhiran kasus prioritas. Forum koordinasi rutin harus ditetapkan antara Dinas Sosial, Dukcapil, pemerintah kecamatan/desa, pendamping PKH, TKSK, bank, agen, PT Pos, sekolah, dan layanan kesehatan. Tindak lanjut perubahan data keluarga harus terdokumentasi dari pelaporan tingkat desa sampai pembaruan sistem. Kapasitas pendamping dan TKSK perlu diperkuat melalui pelatihan bisnis proses, penanganan keluhan, pemutakhiran data, dan perlindungan kelompok rentan. Temuan tentang ketidaksinkronan data DTSEN, Dukcapil, Dapodik, dan data penyaluran menunjukkan bahwa persoalan ini merupakan persoalan tata kelola, bukan sekadar persoalan teknis (Hadiwidjaja et al., 2022; Iqbal et al., 2025; Widyaningsih et al., 2023). Dengan demikian, forum koordinasi lintas sektor perlu memiliki alur kerja dan pencatatan yang jelas, mulai dari pelaporan perubahan kondisi keluarga di tingkat desa hingga pembaruan dalam sistem dan penyelesaian kasus penyaluran. Selain itu, peningkatan aksesibilitas layanan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan dalam penyaluran bantuan sosial harus benar-benar inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penerima (Hairia et al., 2024).

Secara keilmuan, penelitian ini memperkaya literatur evaluasi kebijakan sosial di Indonesia dengan perspektif *delivery* dan *net benefit* yang masih jarang dibahas secara sistematis, khususnya pada konteks kemiskinan ekstrem di daerah (Cahyadi et al., 2020; Timire et al., 2022; Trenouth et al., 2023). Kerangka indikator yang dikembangkan dapat diadaptasi untuk evaluasi program bantuan sosial di kabupaten lain dengan karakteristik geografis serupa, sehingga memberikan kontribusi metodologis bagi studi evaluasi kebijakan sosial di Indonesia. Selain itu, integrasi data administratif dengan temuan kualitatif dalam kerangka *evidence-based policy* menyediakan model evaluasi yang dapat direplikasi dalam konteks kebijakan sosial lainnya, memperkuat kapasitas penelitian berbasis bukti di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas PKH dan Program Sembako di Kabupaten Tolitoli tidak dapat diukur dari capaian administratif semata, melainkan harus dinilai melalui penerimaan manfaat aktual oleh KPM. Temuan menunjukkan kesenjangan antara cakupan administratif dan cakupan efektif, dengan 297 KKS belum tersalur pada 2025, serta hambatan data kependudukan, rekening bermasalah, dan ketidaksinkronan DTSEN-Dukcapil-Dapodik. Hambatan geografis (biaya akses menuju lokasi pencairan bantuan dari wilayah sulit akses), keterbatasan agen, dan laporan biaya jasa penarikan menghasilkan ketimpangan manfaat bersih antarkelompok dan antarwilayah. Kapasitas pelaksana terbatas (rata-rata pendamping menangani ≥ 300 KPM) dan koordinasi lintas sektor yang lemah memperburuk situasi. Penelitian merekomendasikan: (1) dashboard pemantauan berbasis tujuh indikator (KPM terdaftar hingga keluhan terselesaikan); (2) penataan titik layanan dan kanal alternatif bagi wilayah terpencil dan kelompok rentan; (3) transparansi biaya dan penguatan pengaduan; (4) forum koordinasi rutin untuk sinkronisasi data; serta (5) penguatan kapasitas pendamping dan TKSK.

Referensi

Aulia, F. M. (2024). Urgensi Satu Data Terperingkat dalam Pencapaian Target Kemiskinan Ekstrem "Nol" Persen. *Bappenas Working Papers*, *7*(3), 210–226. https://doi.org/10.47266/bwp.v7i3.362

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli. (2025). *Statistik Daerah Kabupaten Tolitoli 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli. https://tolitolikab.bps.go.id/id/publication/2025/09/30/04dcfc589553d7ab645f6616/statistik-daerah-kabupaten-tolitoli-2025.html

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli. (2026). Kabupaten Tolitoli dalam Angka 2026. In Kurniawati (Ed.), *Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli* (Vol. 27). Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli.

Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A., Satriawan, E., & Sumarto, S. (2023). Electronic Food Vouchers: Evidence from an At-Scale Experiment in Indonesia. *American Economic Review*, *113*(2), 514–547. https://doi.org/10.1257/aer.20210461

Bank Mandiri Cabang Tolitoli. (2025). *Laporan Distribusi KKS PKH dan Sembako (Cutt off November 2025)*. Bank Mandiri Cabang Tolitoli.

Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). Cumulative Impacts of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy*, *12*(4), 88–110. https://doi.org/10.1257/pol.20190245

Cairney, P., & Oliver, K. (2017). Evidence-based policymaking is not like evidence-based medicine, so how far should you go to bridge the divide between evidence and policy? *Health Research Policy and Systems*, *15*(1), 35. https://doi.org/10.1186/s12961-017-0192-x

Devany, A., & Imanuari Pertiwi, V. (2025). Manajemen Co-Production dalam Program Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) pada Posyandu Desa Tegalsari Selatan Kabupaten Jember. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, *7*(10). https://doi.org/10.47467/reslaj.v7i10.8732

Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli. (2025). *Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)*.

Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli. (2026). *Data Terpadu Sosial Ekonomi Nusantara (DTSEN)*. Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI. (2022). *Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 120/5/HK.01/8/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sembako*. Kementrian Sosial RI.

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. (2024). *Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 8/3/BS.00.01/1/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Kementrian Sosial RI.

Djamaluddin, S. (2016). *Economics and Finance in Indonesia Accelerating Financial Inclusion through Non-cash Assistance : Exploring Factor Affecting Beneficiaries Perception Accelerating Financial Inclusion through Non-cash Assistance : Exploring Factor Affecting Beneficiaries P*. *62*(3). https://doi.org/10.47291/efi.v62i3.554

Doyle, L., McCabe, C., Keogh, B., Brady, A., & McCann, M. (2020). An overview of the qualitative descriptive design within nursing research. *Journal of Research in Nursing*, *25*(5), 443–455. https://doi.org/10.1177/1744987119880234

Firmansyah, A., & Darmastuti, D. (2026). Implementasi Bantuan Sosial Di Indonesia Dalam Kerangka Sustainable Development Goals. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, *21*(1), 44–59. https://doi.org/10.52062/jaked.v21i1.5384

Hadiwidjaja, G., Giannozzi, S. F., & Williams, A. M. (2022). Meningkatkan Kualitas Data untuk Mencapai Registri Sosial yang Efektif di Indonesia. In *The Bank Dunia*. https://policycommons.net/artifacts/2685659/meningkatkan-kualitas-data-untuk-mencapai-registri-sosial-yang-efektif-di-indonesia-indonesian/3708246/

Hairia, Sakawati, H., & Yamin, M. N. (2024). Evaluation of Services For Persons With Disabilities at The Office of Population and Civil Registry Services, Enrekang District. *Perkembangan Kajian Sosial*, *1*(1), 37–46. https://doi.org/10.69616/p.v1i1.11

Harthamia, N. M. S., Prabawati, Ni Putu Anik, & Wirantari, I Dewa Ayu Putri. (2025). Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) Studi Kasus Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara. *Socio-Political Communication and Policy Review*, *2*(3). https://doi.org/10.61292/shkr.251

Hasnita, S. S., & Salomo, R. V. (2025). Policy Learning of One Data Indonesia for Supporting Data-Driven Policy. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, *10*(1), 1–25.

https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.1-25.2025
Iqbal, M., Nursifa, & Zaskia. (2025). Public Understanding, The Role of Local Actors, and Innovation in Collaboration to Alleviate Poverty in Tolitoli City. *Perkembangan Kajian Sosial*, *2*(2), 61–71. https://doi.org/10.69616/perkasa.v2i2.323
J. W. Creswell and C. N. Poth. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th editio). SAGE Publications.
Jhon Kamaru, Rustam Tohopi, Yakob Noho Nani, Rusli Isa, & Muchtar Ahmad. (2026). Kapasitas Administratif dan Efektivitas Transfer Tunai Bersyarat: Bukti dari Tata Kelola Perlindungan Sosial Lokal. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, *3*(2), 318–337. https://doi.org/10.62383/presidensial.v3i2.1761
Julaihah, U., Miranti, R., & Gebremedhin, T. (2026). Digitising social assistance payments to accelerate financial inclusion in East Java, Indonesia: which factors matter for user acceptance? *Oxford Development Studies*, *54*(1), 77–94. https://doi.org/10.1080/13600818.2025.2588189
Kabeer, N., & Waddington, H. (2015). Economic impacts of conditional cash transfer programmes: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Development Effectiveness*, *7*(3), 290–303. https://doi.org/10.1080/19439342.2015.1068833
Kadir, R. D., Tri Wahyudi, S., Maski, G., & Devia Sagita Sumantri, V. (2025). The role of financial inclusion in reducing household poverty: insights from Eastern Indonesia. *Cogent Economics & Finance*, *13*(1). https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2588925
Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Laporan Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2025*. https://kemensos.go.id/unduh/laporan/Laporan-Kinerja-Kementerian-Sosial-Tahun-2025
Kementrian Sosial RI. (2024). *Laporan Kinerja Kementerian-Sosial Tahun 2024*. https://kemensos.go.id/unduh/laporan/Laporan-Kinerja-Kementerian-Sosial-Tahun-2024
Lentari, S. (2024). Evidence-Based Policy Making: Penggunaan Bukti Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Timur. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, *12*(1). https://doi.org/10.31289/publika.v12i1.11648
Lindert, K., Karippacheril, T. G., Rodriguez Caillava, I., & Nishikawa Chavez, K. (2020). *Sourcebook on the Foundations of Social Protection Delivery Systems*. Washington, DC: World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1577-5
Moser, A., & Korstjens, I. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 3: Sampling, data collection and analysis. *European Journal of General Practice*, *24*(1), 9–18. https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375091
Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, *16*(1). https://doi.org/10.1177/1609406917733847
O'Connor, C., & Joffe, H. (2020). Intercoder Reliability in Qualitative Research: Debates and Practical Guidelines. *International Journal of Qualitative Methods*, *19*. https://doi.org/10.1177/1609406919899220
Ojah, K., & Kodongo, O. (2024). Effective financial inclusion and the need to put the horse before the cart: Saving! *International Review of Financial Analysis*, *96*, 103737. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103737
Presiden RI. (2025). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Datatunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/314649/inpres-no-4-tahun-2025
Ramayanti, & Holijah. (2026). A Legal Analysis of the Implementation of Social Assistance Policies in Indonesia : Challenges in Data Synchronization and Law Enforcement. *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, *15*(1), 103–118. https://journal.uinsuna.ac.id/index.php/syarah/article/view/7556/2216
Rosfadhila, M., Toyamah, N., Sulaksono, B., Devina, S., Sodo, R. J., & Syukri, M. (2013). *A Rapid Appraisal of the Implementation of the 2008 Direct Cash Transfer Program and Beneficiary Assessment of the 2005 Direct Cash Transfer Program in Indonesia*. (March). http://www.smeru.or.id/report/research/blt/blt2008_eng.pdf
Sarjito, A. (2025). Evaluation of the Efficiency of the Social Welfare Information System-Next Generation (SIKS-NG) in the Distribution of Social Assistance. *Journal of Governance and Public Affairs*, *2*(1). https://jgpa.unja.ac.id/jgpa/article/download/39/13
Timire, C., Sandy, C., Ferrand, R. A., Mubau, R., Shiri, P., Mbiriyawanda, O., Mbiba, F., Houben, R.

M. G. J., Pedrazzoli, D., Bond, V., Foster, N., & Kranzer, K. (2022). Coverage and effectiveness of conditional cash transfer for people with drug resistant tuberculosis in Zimbabwe: A mixed methods study. *PLOS Global Public Health*, *2*(12), e0001027. https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001027

Trenouth, L., Sibson, V. L., Grijalva-Eternod, C. S., Golden, K., & Puett, C. (2023). Cost and cost-efficiency of unconditional cash transfers in Tahoua, Niger. *Journal of Development Effectiveness*, *15*(1), 111–123. https://doi.org/10.1080/19439342.2022.2158903

Villamin, P., Lopez, V., Thapa, D. K., & Cleary, M. (2025). A Worked Example of Qualitative Descriptive Design: A Step-by-Step Guide for Novice and Early Career Researchers. *Journal of Advanced Nursing*, *81*(8), 5181–5195. https://doi.org/10.1111/jan.16481

Wahyudi, R., Sondakh, F., & Permatasari, V. N. A. (2024). *Social Protection Inclusion in Indonesia's Remote Areas - Identifying and Addressing Gaps and Challenges*. Washington, DC: World Bank. https://doi.org/10.1596/41977

Widyaningsih, D., Ruhmaniyati, & Toyamah, N. (2023). Urgensi Memutakhirkan Data Terpadu Kemiskinan Secara Berkelanjutan dan Berkualitas: Pembelajaran dari Studi Kasus Di Enam Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, *31*(2), 21–42. https://doi.org/10.55981/jep.2023.1013

World Bank Group. (2020). *Strengthening Conditional Cash Transfers and the Single Registry in Brazil: A Second-Generation Platform for Service Delivery for the Poor*. https://www.worldbank.org/en/results/2020/04/22/strengthening-conditional-cash-transfers-and-the-single-registry-in-brazil#:~:text=made directly to the mother,tested programs

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).